

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 berisikan aturan tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini mengatur mengenai penetapan kebijakan pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional guna mencapai rencana pembangunan menengah nasional tahun 2024.

Indonesia mengalami transisi demografi yang cepat sejak tahun 1971 hingga saat ini, perubahan transisi ini mengarah pada situasi yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi perubahan struktur kependudukan yang ditandai dengan angka kelahiran dan kematian rendah (Irianto, 2016).

Melihat realita Indonesia, diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2017 sampai 2019 untuk gelombang pertama dan 2020 sampai 2030 untuk gelombang bonus demografi kedua. Hal ini berarti komposisi jumlah penduduk dengan usia produktif 15-64 tahun mencapai titik maksimal jika dibandingkan dengan usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dengan kata lain, telah terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja potensial (Jati, 2015).

Bonus demografi akan menjadi andalan peningkatan produktifitas suatu Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif, dimana penduduk usia produktif tersebut mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dijadikan investasi. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlahnya besar, tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan menjadi beban ekonomi karena akan menjadi

beban bagi penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi (Maryati, 2015).

Karakteristik dari pengangguran yang ada di Indonesia salah satunya adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut juga dengan pengangguran terdidik (dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas) (Pratomo, 2017). Pengangguran di Indonesia berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2016 didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah atas (baik umum maupun kejuruan) dan pendidikan tinggi (sarjana dan diploma). Artinya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi penganggur pun semakin tinggi (Nur Asnawi, 2005), fenomena yang demikian ini sangat ironis. Penelitian dari Allen (Allen, 2016) menunjukkan bahwa sepertiga dari penganggur terutama pada usia muda dan berpendidikan (Sekolah Menengah Atas, diploma dan sarjana), harus menunggu selama satu tahun, untuk dapat masuk pasar kerja sektor formal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja muda berpendidikan dengan lingkup pasar kerja sektor formal yang tersedia.

Penyebab pengangguran di Indonesia adalah masalah keterampilan dan pendidikan. Kurangnya pendidikan menyebabkan seseorang sangat sulit menyerap sebagai tenaga kerja. Orang yang tidak berpendidikan tinggi biasanya hanya berakhir sebagai buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak memiliki jiwa wirausaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran tetap. Selain itu, orang-orang yang tidak mendapatkan cukup uang untuk mencapai pendidikan tidak mau meningkatkan keterampilan mereka seperti mengemudi, memasak, atau bertani.

Sebagian besar orang di Indonesia tidak memiliki keterampilan wirausaha yang cukup untuk membangun bisnis. Mereka memiliki pola pikir yang salah bahwa mereka harus mendapatkan pekerjaan setelah lulus

tanpa berpikir mereka harus menciptakan pekerjaan setelah lulus. Jadi persaingan untuk mencari pekerjaan lebih besar daripada membuat bisnis. Padahal, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk membangun bisnis. Mereka tidak bisa melihat peluang potensial ini untuk menjadi pengusaha.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 masih tinggi. dari jumlah penduduk 2,3 juta orang, sekitar 11,52 persen tercatat masih mencari pekerjaan. jumlah tersebut berdasarkan data pengajuan pembuatan surat kartu kuning. Kartu jenis ini biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berusaha untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya dengan cara memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkerjakan masyarakat dalam usahanya, sesuai dengan pendidikannya atau keahliannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lalu diadakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah Desa dan Masyarakat Gebang Kulon sudah menyepakati akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Cafe Panorama Desa Gebang Kulon. Cafe Panorama dalam usahanya menggunakan basis *social entrepreneur*, yaitu pemilik usaha tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melainkan untuk mensejahterakan mitra-mitra kerjanya. Cafe Panorama merupakan salah satu tempat kuliner di Desa Gebang

Kulon, cafe ini menyajikan makanan dan minuman yang ada di cafe pada umumnya. Tempatnya cukup strategis karena ada sarana dan prasarana bagi masyarakat, sehingga menjadi pusat keramaian Desa Gebang Kulon.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa diperoleh gambaran mengenai bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Kulon menghadapi keterbatasan dalam lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini disebabkan oleh rendahnya diversifikasi ekonomi, kurangnya investasi dalam sektor-sektor non-pertanian, atau kurangnya akses terhadap peluang pekerjaan di sektor formal, desa masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan, keterampilan masyarakat Desa Gebang Kulon yang masih rendah, sehingga penduduk desa masih belum mampu bersaing dalam pasar kerja secara global. Hal demikian yang menjadi permasalahan bagi desa Gebang Kulon, pentingnya penanganan masalah di Desa Gebang Kulon untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Pendekatan yang holistik yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta dukungan kelembagaan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Penerapan *Sociopreneur* disana dan atas dasar itulah peneliti melakukan kajian penelitian dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI SOCIOPRENEURSHIP PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI CAFE PANORAMA DESA GEBANG KULON”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari gambaran umum latar belakang masalah yang telah di uraikan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Implementasi Sociopreneur bagi masyarakat khususnya orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan di desa Gebang Kulon
2. Pengelolaan Sociopreneur pada Cafe Panorama di desa Gebang Kulon

3. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat di desa Gebang Kulon.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan beberapa masalah yang teridentifikasi, tentu adanya keterbatasan penelitian agar pembahasan dalam penelitian ini lebih jelas terhadap satu masalah, maka penelitian ini terfokus pada Implementasi Sociopreneur pada masyarakat Desa Gebang Kulon. berikutnya mengenai pemanfaatan Sociopreneur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk masyarakat, dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan Masyarakat di desa Gebang Kulon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai acuan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sociopreneur pada Cafe Panorama di desa Gebang Kulon ?
2. Bagaimana pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi masyarakat khususnya orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan di desa Gebang Kulon melalui Sociopreneur ?
3. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat di desa Gebang Kulon ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi sociopreneur pada Cafe Panorama di desa Gebang Kulon.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi masyarakat khususnya orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan di desa Gebang Kulon melalui Sociopreneur.
3. Untuk mengetahui kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan masyarakat di desa Gebang Kulon.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi informasi bagi yang ada dalam dunia pendidikan, manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan konsep mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Sociopreneur pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan Sociopreneur sehingga mampu menjadi skripsi yang berkualitas.

b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Manfaat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dapat menjadi perhatian dan pembelajaran untuk memajukan perekonomian Desa Gebang Kulon.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.